

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA
MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN
INDONESIA
SKRIPSI**

Oleh:

DWI SUSILO BUDIYANTO

202010115028



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TIMBUNAN
SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN INDONESIA

Nama Mahasiswa : DWI SUSILO BUDIYANTO

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115028

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN: 0304058306

Pembimbing II

Rama Dhianty, S.H., M.H

NIDN : 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TIMBUNAN
SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN INDONESIA

Nama Mahasiswa : DWI SUSILO BUDIYANTO

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115028

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN. 0304058306

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

NIDN. 0302057403

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NIDN. 0331028008

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003


Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
SEBAGAI UPAYA MENGURANGI
TIMBUNAN SAMPAH PLASTIK DI
LAUTAN INDONESIA.

Nama Mahasiswa : DWI SUSILO BUDIYANTO

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115028

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengurangi Timbunan Sampah Plastik Di Lautan Indonesia.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dwi Susilo Budiyanto

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Susilo Budiyanto

NPM : 202010115028

TTL : Jakarta 15 April 1981

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
“PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN INDONESIA.”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dwi Susilo Budiyanto

ABSTRAK

Dwi Susilo Budiyo, 202010115028, Penegakan Hukum Lingkungan

Sebagai Upaya Mengurangi Timbunan Sampah Plastik Di Lautan Indonesia

Sampah plastik merupakan masalah besar di Indonesia, terlihat dari jumlah sampah plastik di laut Indonesia pada 2022 tercatat berjumlah sebanyak 398.000 ton Plastik dalam jumlah memprihatinkan di lautan Indonesia ini sendiri dapat dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan di laut. Pencemaran ini memiliki dampak yang buruk terhadap kehidupan biota laut karena dapat bertahan hingga bertahun-tahun dan berpotensi merusak ekosistem laut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan melakukan analisis kebijakan, studi kasus penegakan hukum yang telah dilakukan, serta pengembangan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum dalam mengurangi sampah plastik di laut. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau library research dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi lingkungan, termasuk penegakan hukum terhadap pembuangan sampah plastik di laut, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kendala utama adalah identifikasi pelaku yang membuang sampah dan penerapan sanksi yang tepat. Meskipun sanksi hukum ada dan cukup berat, mereka sering kali sulit diterapkan karena sulitnya menangkap pelaku secara langsung dan menentukan sumber asli sampah plastik. Selain itu, ada juga masalah kekosongan hukum dalam kasus pencemaran sampah laut. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi timbunan sampah plastik di lautan Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk regulasi hukum. Tindakan preventif dan represif menjadi bagian dari upaya ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai langkah preventif. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim juga menunjukkan upaya preventif untuk mencegah pencemaran lingkungan laut oleh sampah dari aktivitas manusia. Salah satu tantangan besar adalah tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur pencemaran sampah plastik di laut. Meski Indonesia memiliki hukum dasar untuk melindungi dan mengelola lingkungan laut, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Laut dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan, namun tidak ada yang secara spesifik mengatasi sampah plastik laut.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Pencemaran Laut, Sampah Laut

ABSTRACT

Dwi Susilo Budiyo, 202010115028, *Enforcement of Environmental Law for Protection as an Effort to Reduce the Accumulation of Plastic Waste in the Indonesian Ocean*

Plastic waste is a significant problem in Indonesia, as evidenced by the quantity of plastic waste in Indonesian waters in 2022, recorded at a staggering 398,000 tons. This enormous amount of plastic waste in Indonesia's seas can be considered marine environmental pollution. This pollution has a detrimental impact on marine life, as it can persist for years and potentially damage the marine ecosystem. Therefore, this research aims to investigate this issue further by analyzing policies, studying case law enforcement that has been carried out, and developing recommendations to improve law enforcement in reducing plastic waste in the sea. This research uses a normative juridical method or library research with secondary data obtained indirectly from literature research, including official documents, research results in reports, and related research to be studied. The research findings show that although Indonesia has various regulations and laws designed to protect the environment, including law enforcement against the disposal of plastic waste at sea, implementation still has challenges. The main obstacle is the identification of those who dump waste and the application of appropriate sanctions. Although legal sanctions exist and are pretty severe, they are often tricky to apply due to the difficulty of catching perpetrators directly and determining the source of plastic waste. Besides, there is also a legal vacuum in cases of marine waste pollution. Meanwhile, the government's efforts to reduce piles of plastic waste in Indonesian seas have been carried out in various ways, including legal regulation. Preventive and repressive actions are part of these efforts. Law Number 32 of 2009 Article 22 regulates the Environmental Impact Analysis (AMDAL) as a preventative step. In addition, Government Regulation Number 21 of 2010 on Maritime Environmental Protection also shows preventive efforts to prevent marine environmental pollution by waste from human activities. One of the major challenges is the absence of specific laws regulating plastic waste pollution in the sea. While Indonesia has basic laws to protect and manage the marine environment, such as Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law Number 32 of 2014 on the Sea, and Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation which regulates environmental pollution, none specifically address marine plastic waste.

Keywords: Plastic Waste, Marine Pollution, Marine Debris

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN INDONESIA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Rama Dhianty, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Konseptual	7
1.6. Kerangka Teoritis	10
1.7. Kerangka Pemikiran	16
1.8. Penelitian terdahulu	16
1.9. Metode Penelitian	21
1.9.1. Jenis Penelitian	21
1.9.2. Pendekatan Penelitian	22
1.9.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penegakan Hukum	25
2.2. Lingkungan Hidup	30
2.3. Pencemaran Lingkungan Hidup	35

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1. Tingkat Pencemaran Sampah Plastik di Laut Indonesia.....	39
3.2. Kasus Pencemaran Sampah Plastik di Laut Indonesia.....	45
3.3. Putusan Mahkamah Agung No. 1542 K / PID.SUS / 2008.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengurangi Tumpukan Sampah Plastik di Lautan Indonesia	61
4.2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengurangi Timbunan Sampah Plastik di Lautan Indonesia	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Istri dan Anak saya dan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah.

Terima Kasih.

